

LAUT MASA DEPAN BANGSA

Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia Yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional



- Pengawasan sumber daya kelautan & perikanan;
- Perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, & keamanan hayati ikan



- SDM Kelautan dan Perikanan
- Inovasi IPTEK kelautan & perikanan



- Penataan ruang laut, konservasi & keanekaragaman hayati laut
- Keberlanjutan usaha perikanan tangkap & budidaya
- Daya saing produk kelautan & perikanan

Latar Belakang Ilmiah Reformasi Kebijakan Perikanan (1/2)

Hasil Penelitian Badan Litbang KP dengan University of California Santa Barbara (UCSB)

Keberhasilan Kebijakan Melawan IUUF

Di bawah direktif Menteri Susi, kebijakan Indonesia untuk memberantas IUUF dari kapal asing dan investasi untuk armada kapal skala-kecil dapat mengurangi upaya penangkapan ikan sebesar 35% (data KKP) dan akan meningkatkan tangkapan ikan dalam jangka panjang selama upaya penangkapan dalam negeri dikelola dengan baik.

Penangkapan Skipjack tuna sampai 2035 (dibandingkan sekarang)

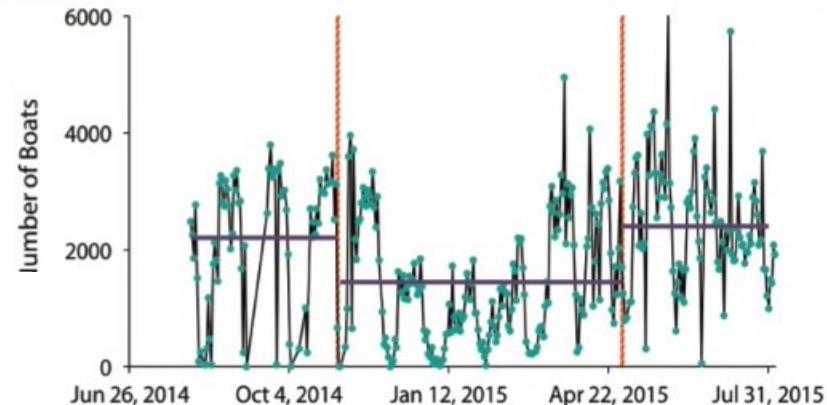
Tidak ada kebijakan IUU	Kebijakan IUU, tidak ada reformasi ^a	Kebijakan IUU, dengan reformasi
-------------------------	---	---------------------------------

↓ 81%

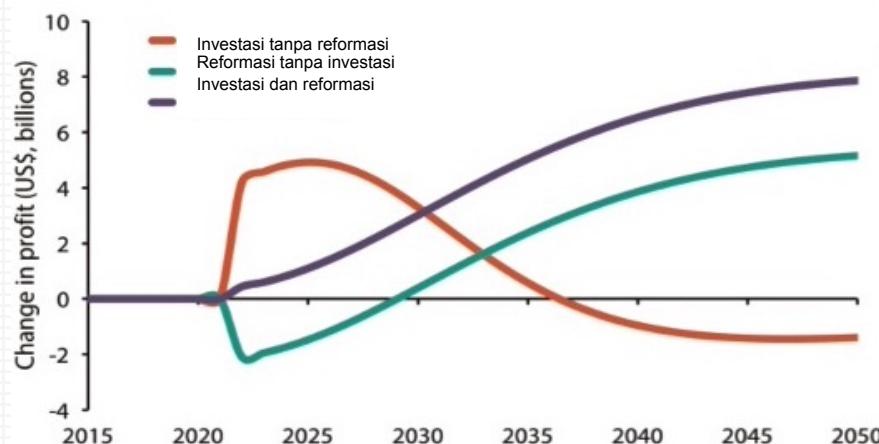
↓ 26%

↑ 25%

^amengurangi open access & menerapkan pengendalian perizinan



Perhitungan independen menunjukkan pengurangan upaya penangkapan ikan di malam hari setelah moratorium, namun upaya penangkapan ini tergantikan meskipun ada perpanjangan setelah 30 April 2015. Dihitung oleh tim UCSB/KKP berdasarkan data dari NOAA Joint Polar Satellite System (JPSS).



*Nilai apabila dibandingkan dengan tidak adanya investasi DAN tidak ada reformasi

Perlunya Reformasi dan Investasi

Bila investasi dilakukan tanpa reformasi, akan menyebabkan kerugian dalam jangka panjang dengan mendukung overfishing

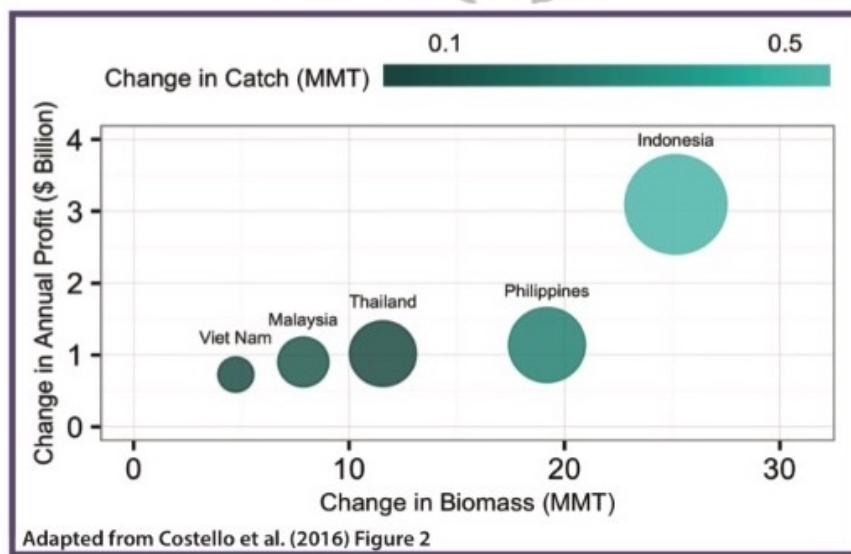
Reformasi perikanan tanpa investasi menyebabkan kehilangan profit dalam jangka pendek, tapi menjaga keuntungan jangka panjang karena pemulihan biomassa ikan.

Reformasi dan Investasi, apabila dijalankan secara bersamaan, akan mencegah kerugian jangka pendek akibat pembatasan, dan memastikan sumberdaya ikan membaik dalam jangka panjang.

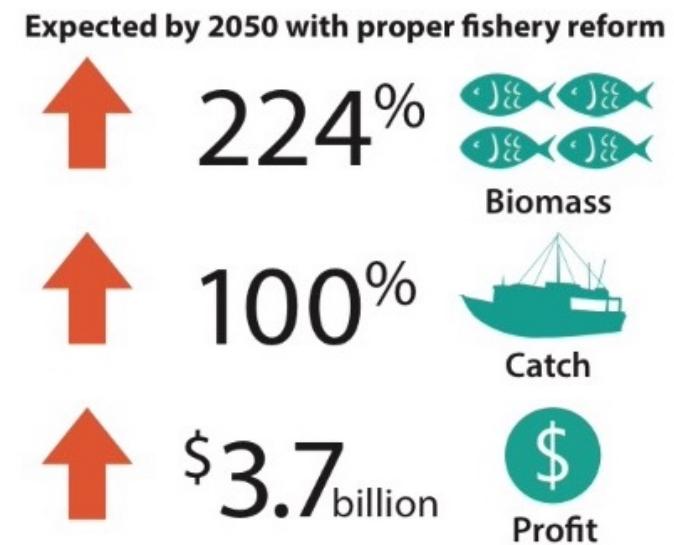
Latar Belakang Ilmiah Reformasi Kebijakan Perikanan (2/2)

Hasil Penelitian Badan Litbang KP dengan University of California Santa Barbara (UCSB)

By 2050, global reform measures would simultaneously generate increases in fish biomass (up to **619 million metric tons**), catch (up to **16 million metric tons**), and fishery profits (up to **\$53 billion**).



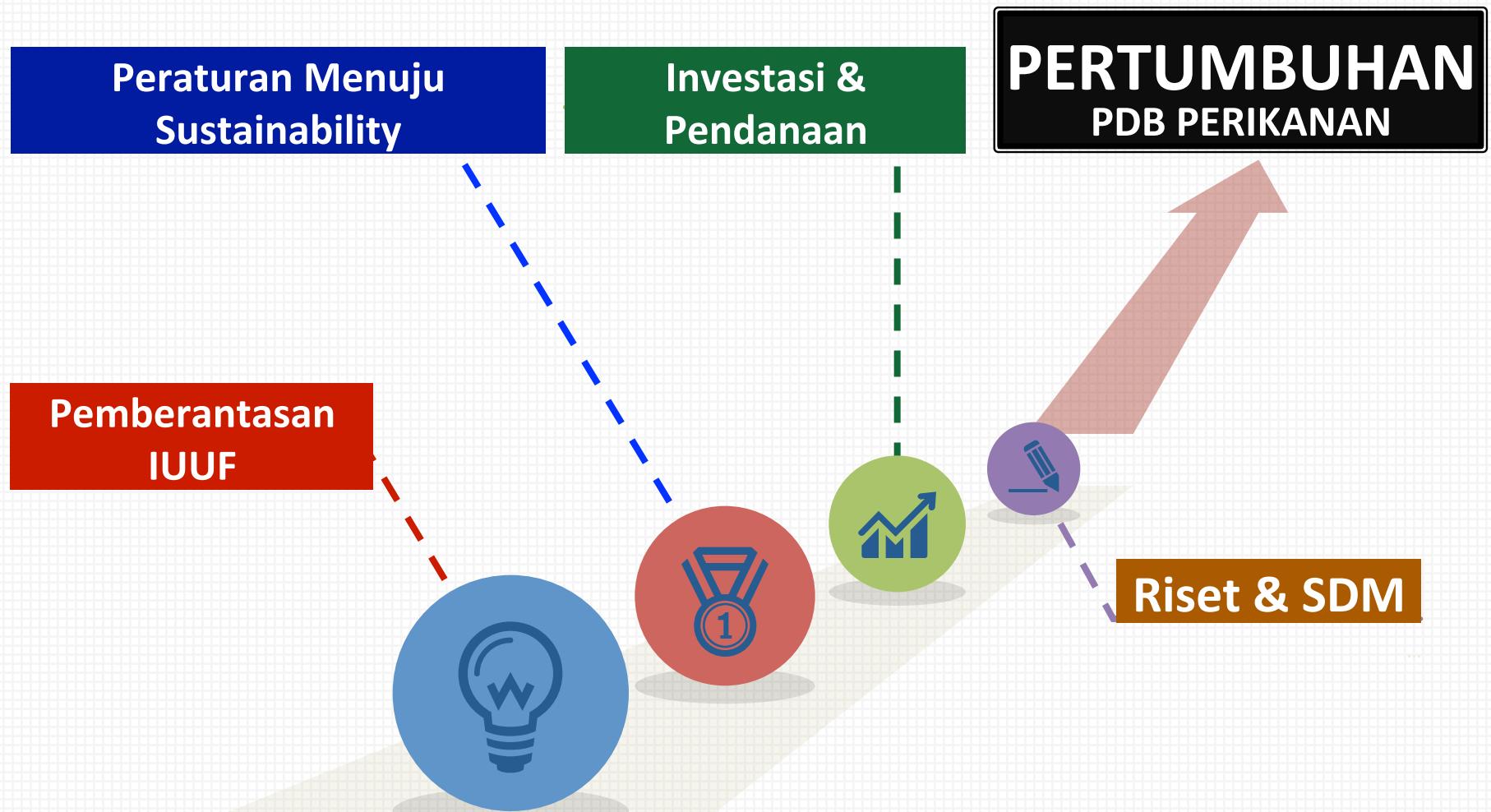
IUU fishing and overexploitation are major concerns for the future of Indonesia's fisheries, threatening the livelihoods of 20 million Indonesians who rely on fishing. However, management reforms would considerably increase biomass, catch, and profit relative to maintaining the status quo.



Proyeksi 2050: Bila kebijakan reformasi perikanan dilakukan secara konsisten, dapat meningkatkan **biomassa ikan 224%**, meningkatkan **tangkapan 100%**, dan **keuntungan ekonomi USD 3,7 miliar**.

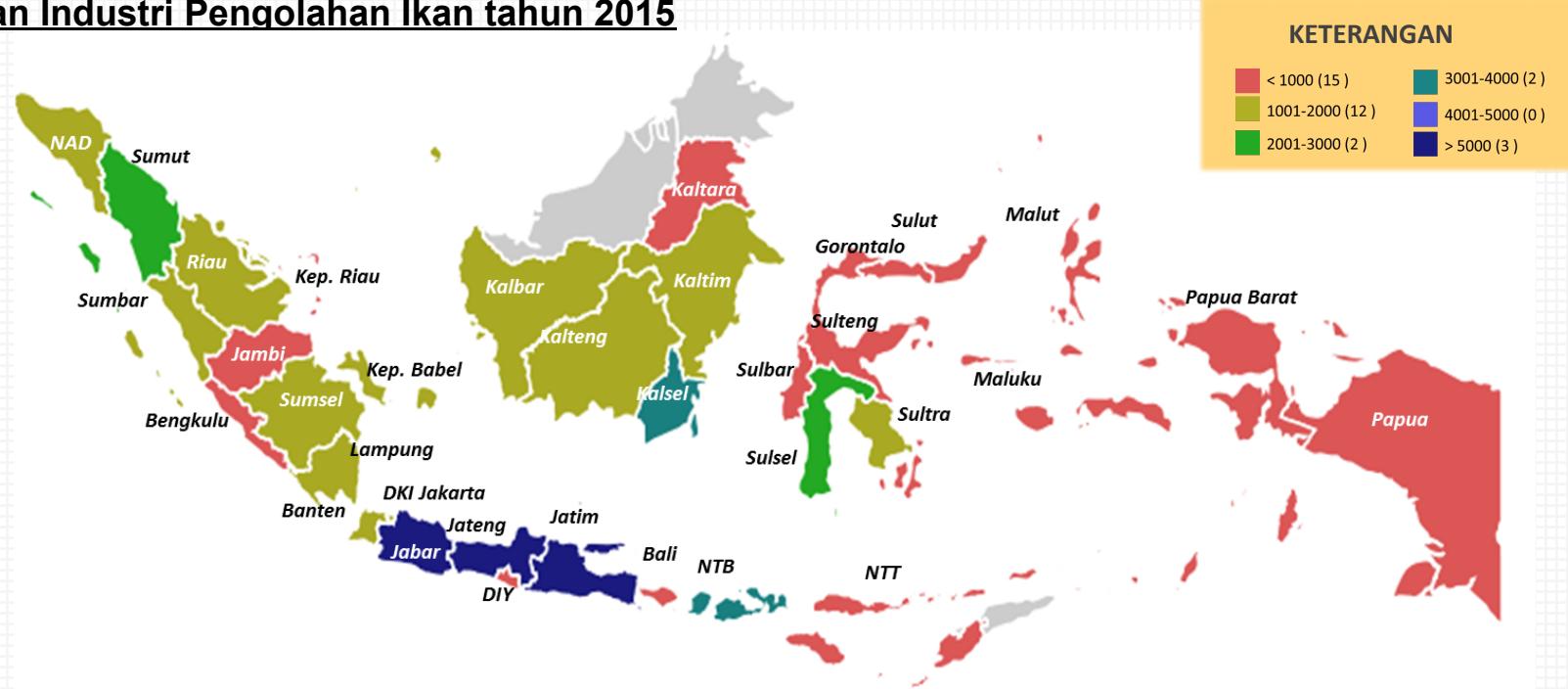
Dan bila dilakukan secara global, pada 2050, biomassa ikan meningkat mencapai 619 juta metrik ton, tangkapan 16 juta metrik ton, dan keuntungan perikanan USD 53 miliar.

Langkah-langkah Reformasi Kebijakan Perikanan

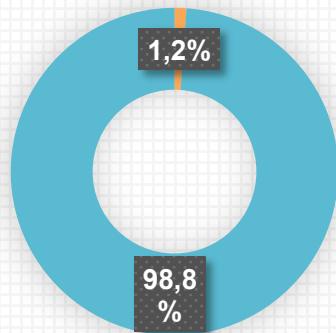


Industri Perikanan Nasional masih Terpusat di Jawa dan UPI masih didominasi skala MKM

Sebaran Industri Pengolahan Ikan tahun 2015



Komposisi Unit Pengolahan Ikan (UPI) berdasarkan Omzet per Tahun:



Jumlah Total UPI : 61.603 unit
• Skala besar = 718 unit*
• Skala MKM = 60.885 unit**

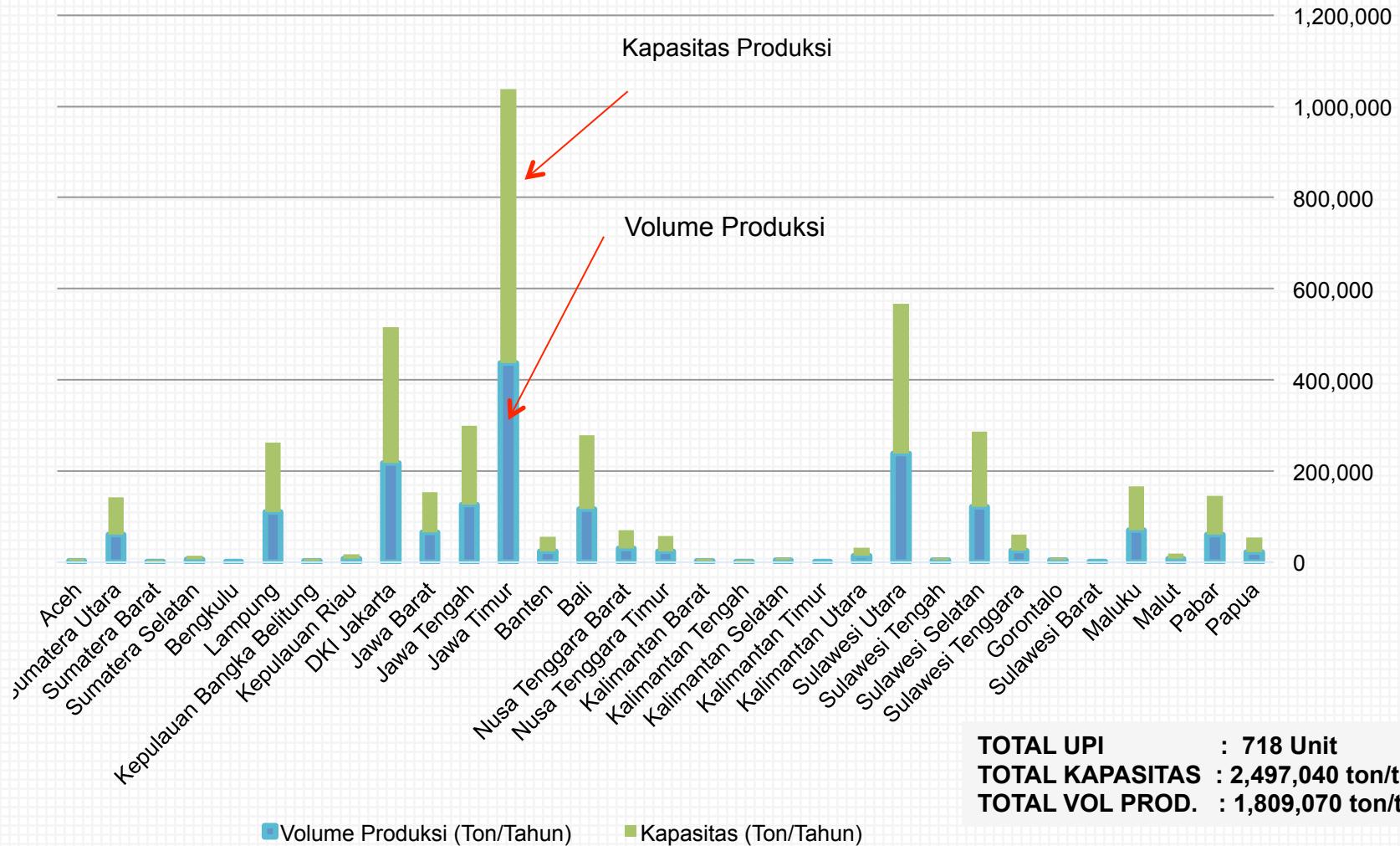
Omzet per tahun:

- UPI Skala Mikro s/d Rp. 300 juta
- UPI Skala Kecil Rp. 300 juta – Rp. 3 miliar
- UPI Skala Menengah Rp. 3 miliar – Rp. 50 miliar
- UPI Skala Usaha Besar > Rp. 50 miliar

Sumber:
*) Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) 2015
**) BPS, 2015

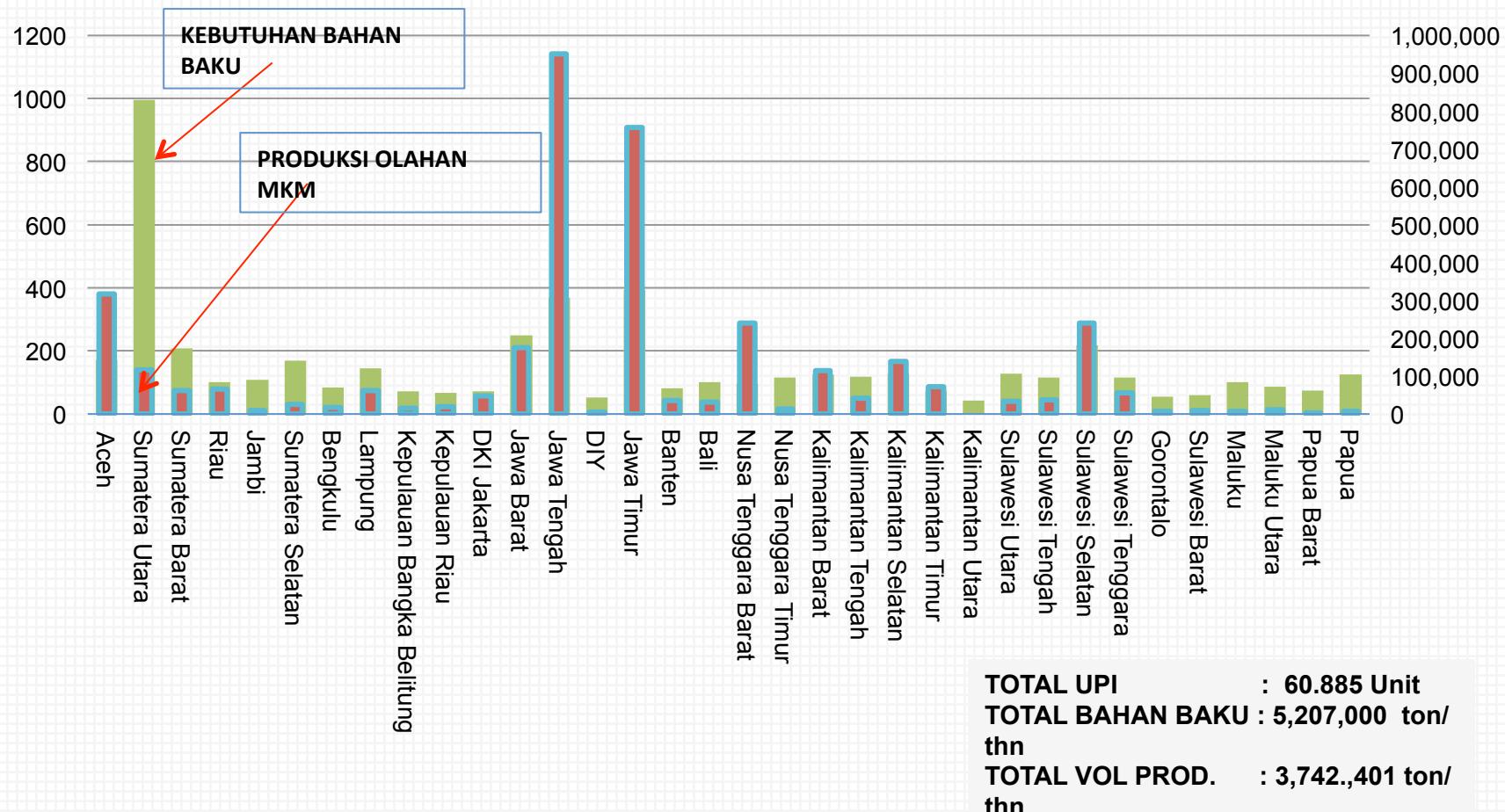
Rata-Rata Utilitas UPI Skala Besar Masih Rendah: < 50% dari kapasitas terpasang

Sebaran Kapasitas vs Volume Produksi Industri Pengolahan Ikan Skala Besar di 34 Provinsi (2015)



Kinerja Industri Pengolahan Ikan Skala MKM Masih dapat Ditingkatkan

Kinerja Produksi Industri Pengolahan Ikan Skala MKM Di 34 Provinsi (2015)

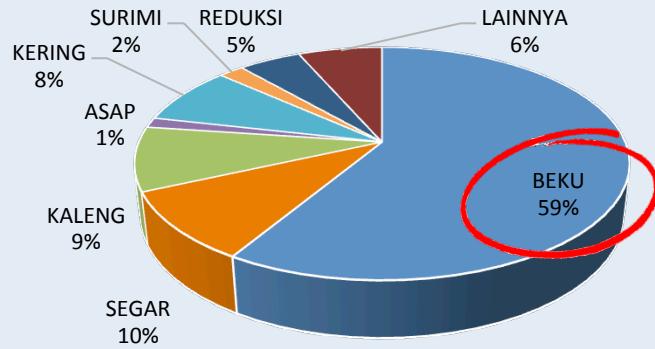


Sumber: Dirjen PDSPKP, 2016

Salah Satu Kunci Ketersediaan Bahan Baku untuk UPI adalah Cold Storage

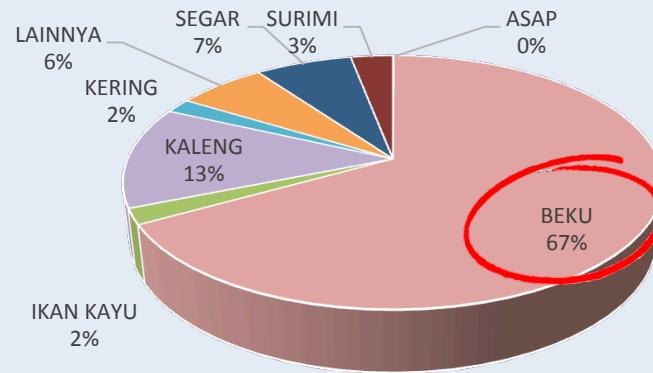
Produk ikan segar dan beku (fresh, frozen) adalah produk bernilai tinggi yang membutuhkan cold storage

Jumlah UPI Skala Besar Menengah Berdasarkan Jenis Olahan (2015)



Jenis Pengolahan	Jumlah UPI (Unit)	Kapasitas Terpasang (Ton/Tahun)
Beku	421	1.572.515
Segar	69	166.732
Kaleng	64	491.460
Asap	10	31.268
Kering	58	83.764
Surimi	14	63.000
Reduksi	35	90.480
Lainnya	47	53.345
Total	718	2.552.564

Volume Produksi UPI Skala Menengah Besar Berdasarkan Jenis Olahan (2015)



Produk Olahan	Volume (Ton)
Beku	414.735
Ikan Kayu	12.383
Kaleng	80.752
Kering	11.574
Lainnya	39.433
Segar	42.814
Surimi	18.747
Asap	382
Total	620.819

Sumber : Ditjen P2HP , 2015

Sebaran Cold Storage masih terkonsentrasi di Wilayah Barat

Pembangunan cold storage terkendala pasokan listrik, jaringan air bersih dan infrastruktur pendukung lainnya

Lokasi Cold Storage Bantuan KKP & Swasta (2015)



Cold Storage KKP (2009-2015)

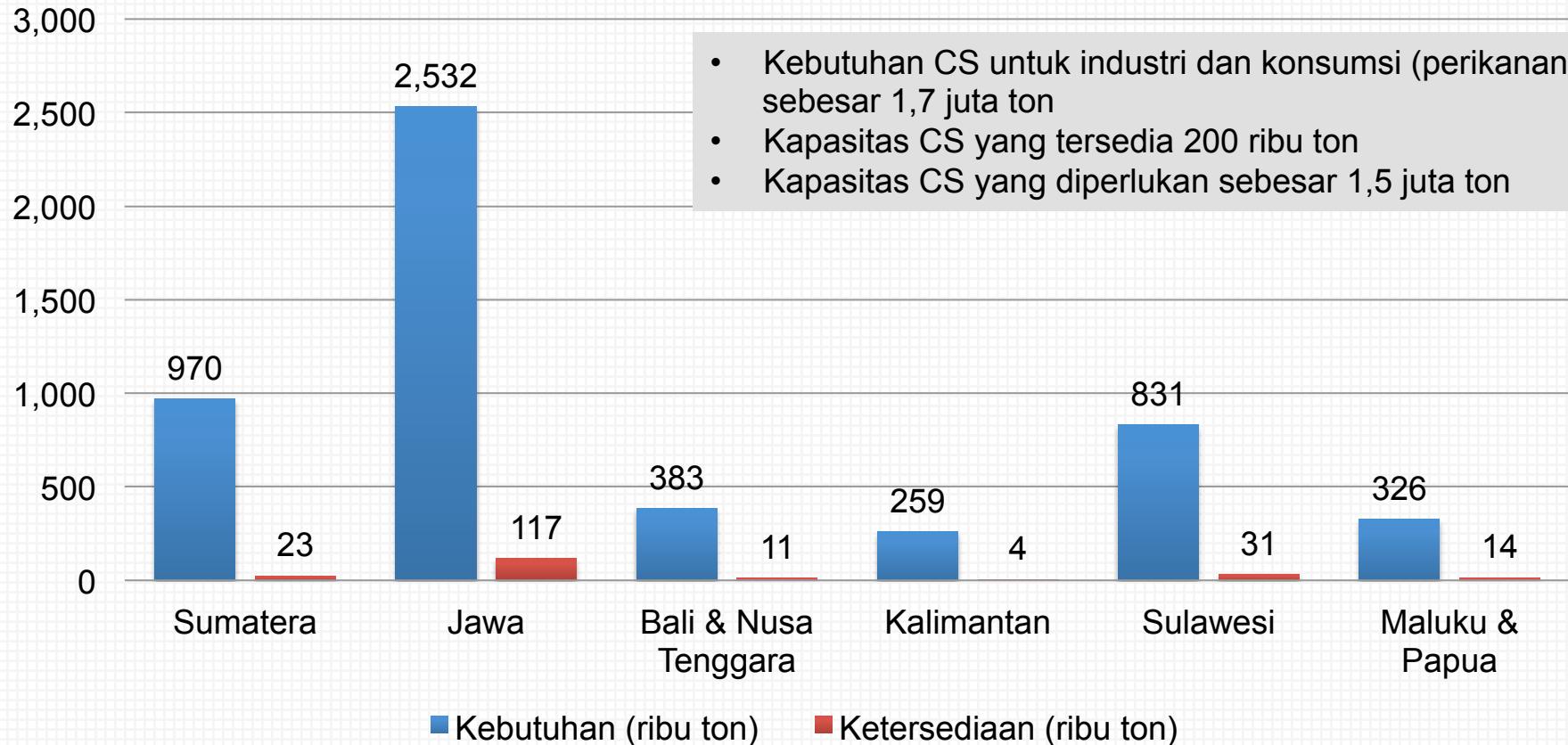


Single Cold Storage KKP (2016)



Cold Storage Swasta (importir)

Kebutuhan Cold Storage untuk Industri: 1,32 juta ton (2015) ~ 1,7 juta ton (2017)



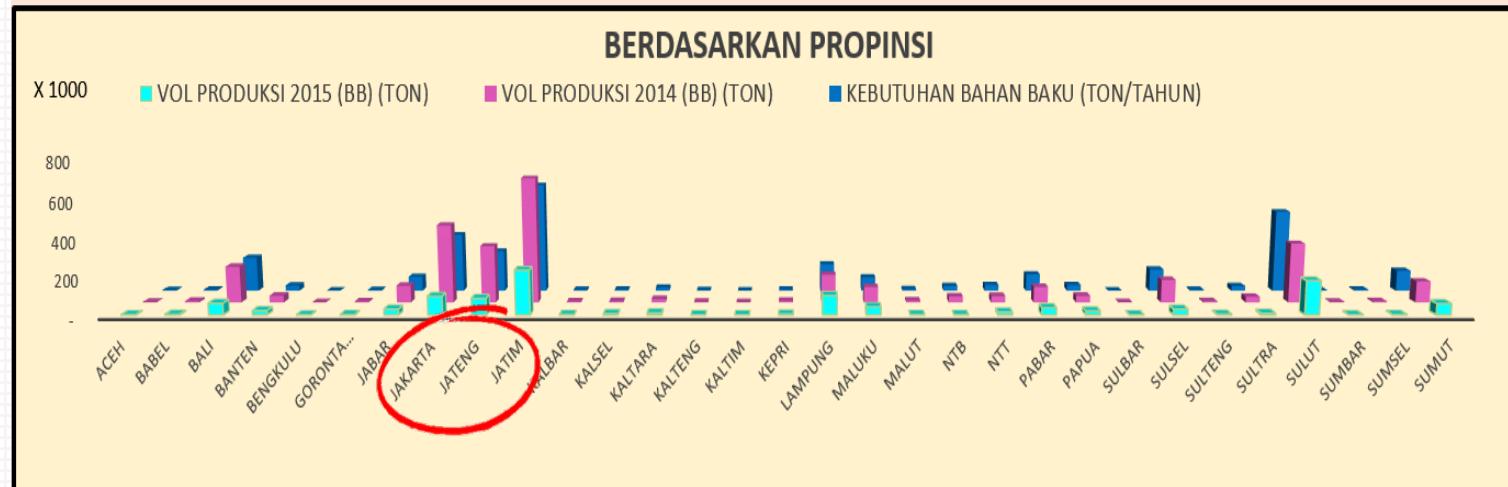
- Diperlukan dukungan **ketersediaan listrik** di setiap wilayah

- Estimasi kebutuhan istrik :

- ✓ Cold storage 200 ton = 142 KVA per unit
- ✓ UPI + Cold Storage 500 ton = 750 KVA per unit
- ✓ UPI + Cold Storage 1000 ton = 1.200 KVA per unit
- ✓ Ice Flake Machine 10 ton = 130 KVA per unit
- ✓ Ice Flake Machine 1,5 ton = 12,5 KVA per unit

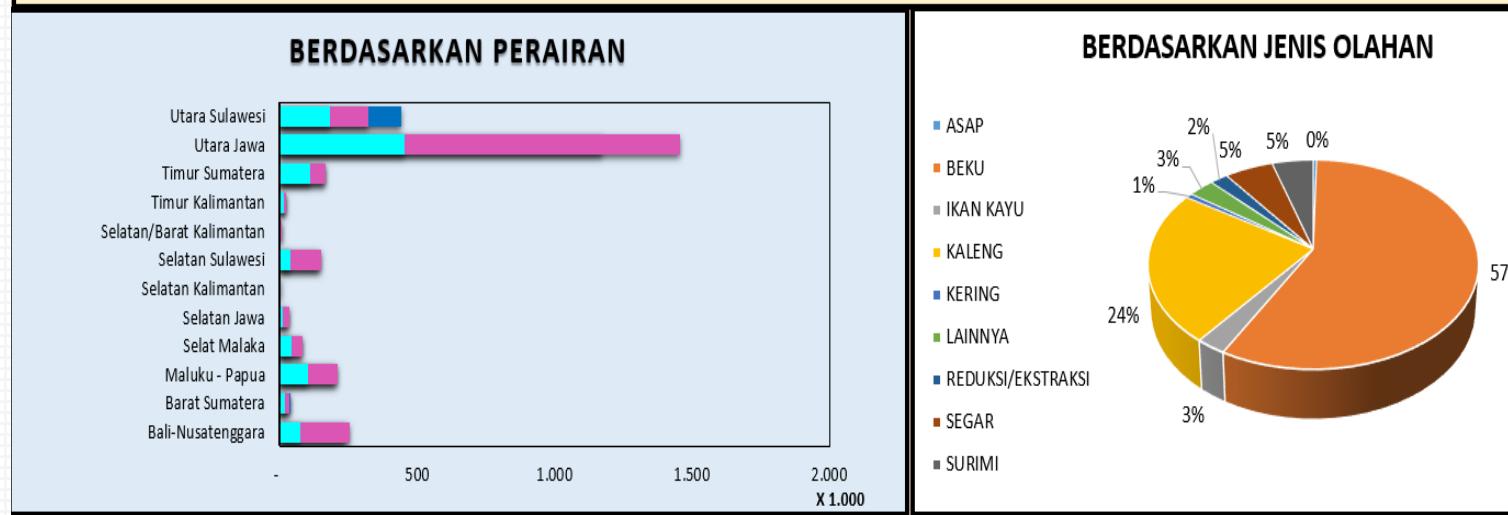
ANALISIS KEBUTUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL

KEBUTUHAN BAHAN BAKU UNIT PENGOLAHAN IKAN SKALA MENENGAH BESAR (TON/TAHUN)*



DATA
KEBUTUHAN BB
VOL PRODUKSI 2014
VOL PRODUKSI 2015

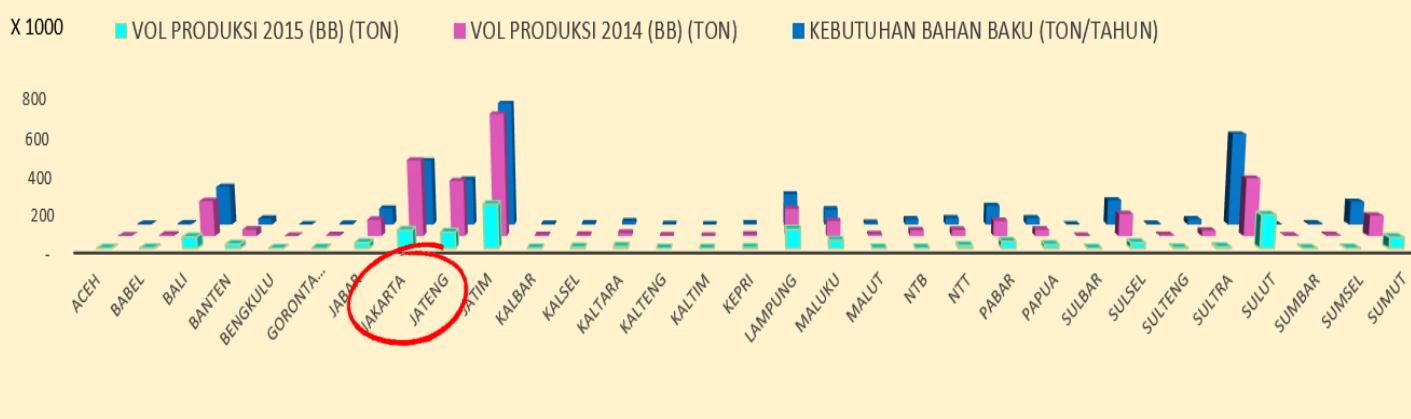
KOMODITAS
UDANG
TUNA
RAJUNGAN
NILA
IKAN PELAGIS KECIL
IKAN DEMERSAL
CEPHALOPODA
CAKALANG
BANDENG



ANALISIS KEBUTUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL

KEBUTUHAN BAHAN BAKU UNIT PENGOLAHAN IKAN SKALA MENENGAH BESAR (TON/TAHUN)*

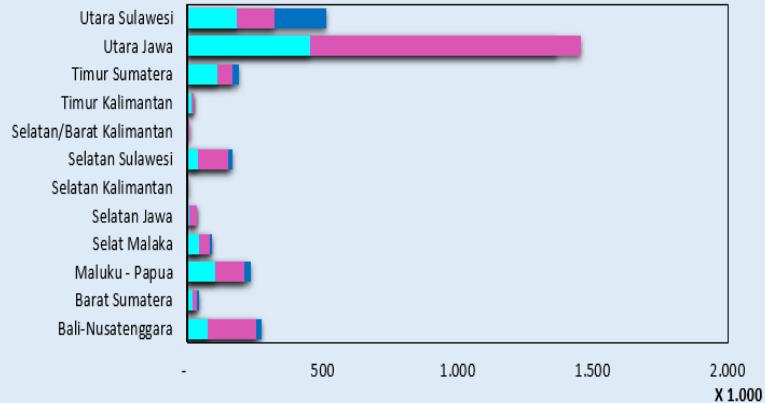
BERDASARKAN PROPINSI



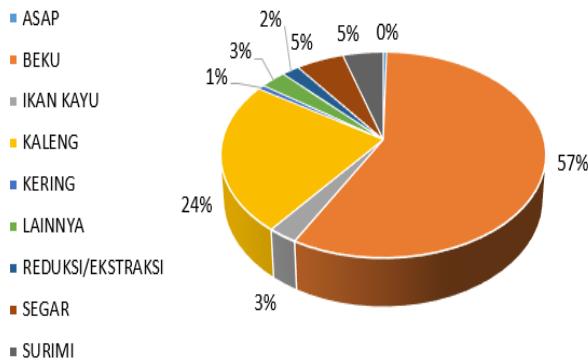
DATA
KEBUTUHAN BB
VOL PRODUKSI 2014
VOL PRODUKSI 2015

KOMODITAS
UDANG
TUNA
RAJUNGAN
NILA
IKAN PELAGIS KECIL
IKAN DEMERSAL
CEPHALOPODA
CAKALANG
BANDENG

BERDASARKAN PERAIRAN



BERDASARKAN JENIS OLAHAN



*Kebutuhan untuk pemenuhan :

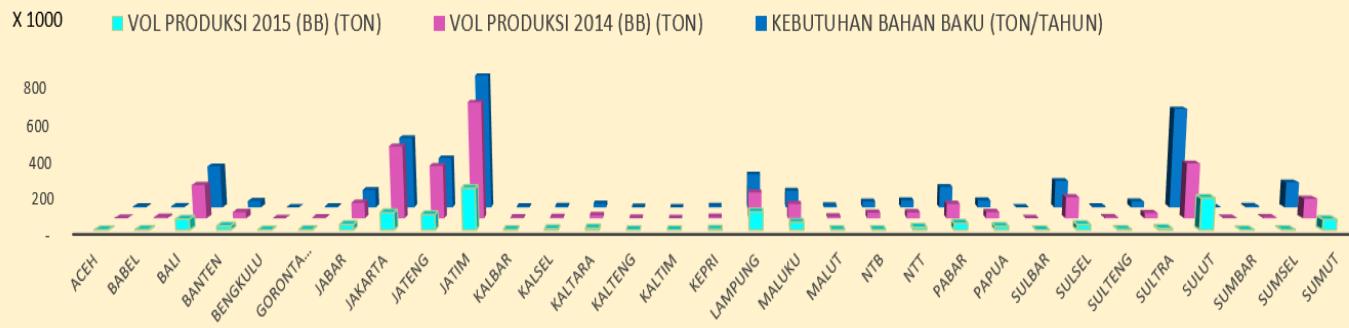
70%

UPDATE

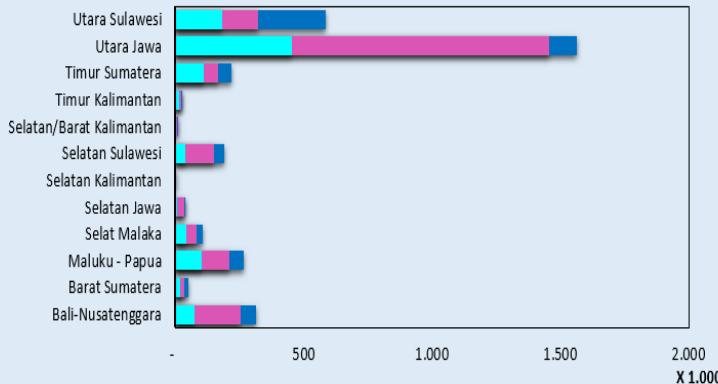
ANALISIS KEBUTUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL

KEBUTUHAN BAHAN BAKU UNIT PENGOLAHAN IKAN SKALA MENENGAH BESAR (TON/TAHUN)*

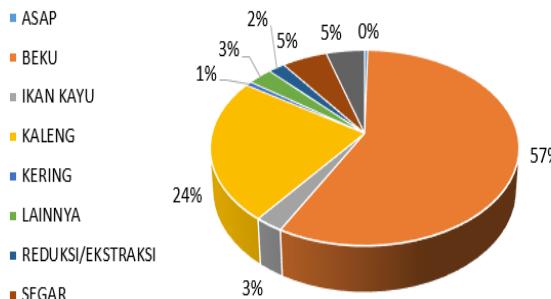
BERDASARKAN PROPINSI



BERDASARKAN PERAIRAN



BERDASARKAN JENIS OLAHAN



*Kebutuhan untuk pemenuhan :

80%

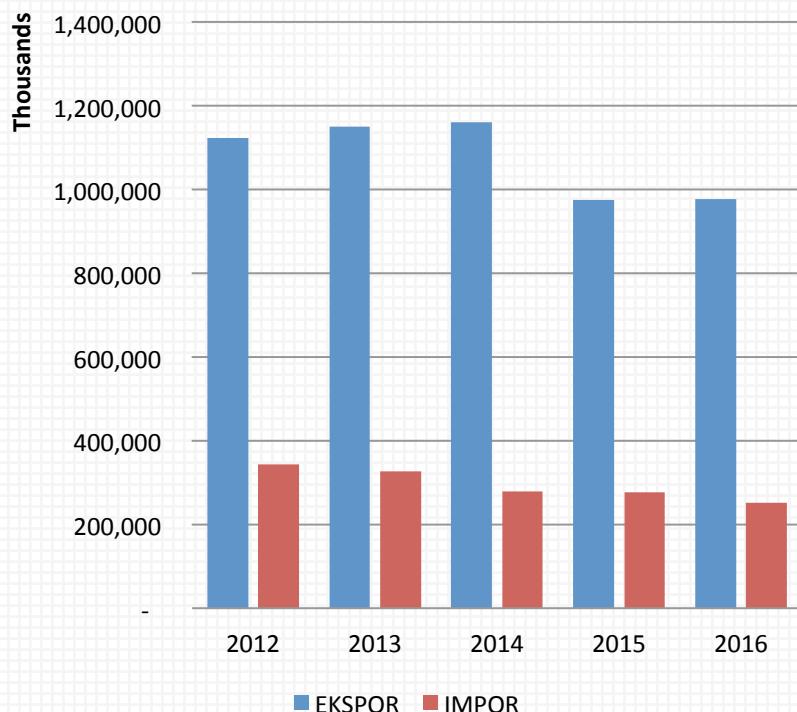
UPDATE

DATA
KEBUTUHAN BB
VOL PRODUKSI 2014
VOL PRODUKSI 2015
KOMODITAS
UDANG
TUNA
RAJUNGAN
NILA
IKAN PELAGIS KECIL
IKAN DEMERSAL
CEPHALOPODA
CAKALANG
BANDENG

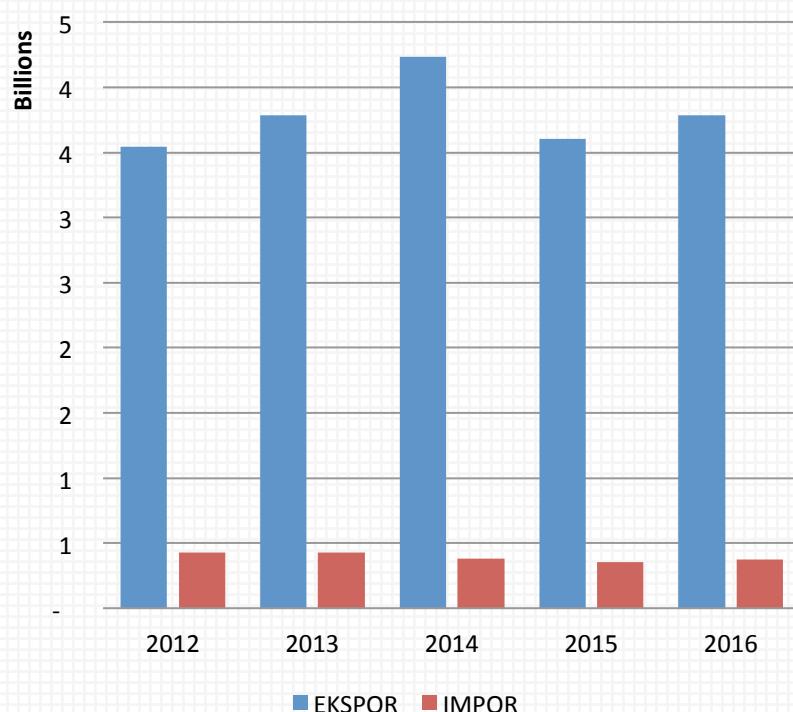
Ekspor – Impor Perikanan : Nilai Ekspor Meningkat

Trend ekspor tahun 2012-2016 menunjukkan bahwa secara volume menurun, namun nilainya meningkat

Volume Ekspor-Impor Perikanan,
Tahun 2012-2016 (ribu ton)



Nilai Ekspor-Impor Perikanan,
Tahun 2012-2016 (US\$ Miliar)



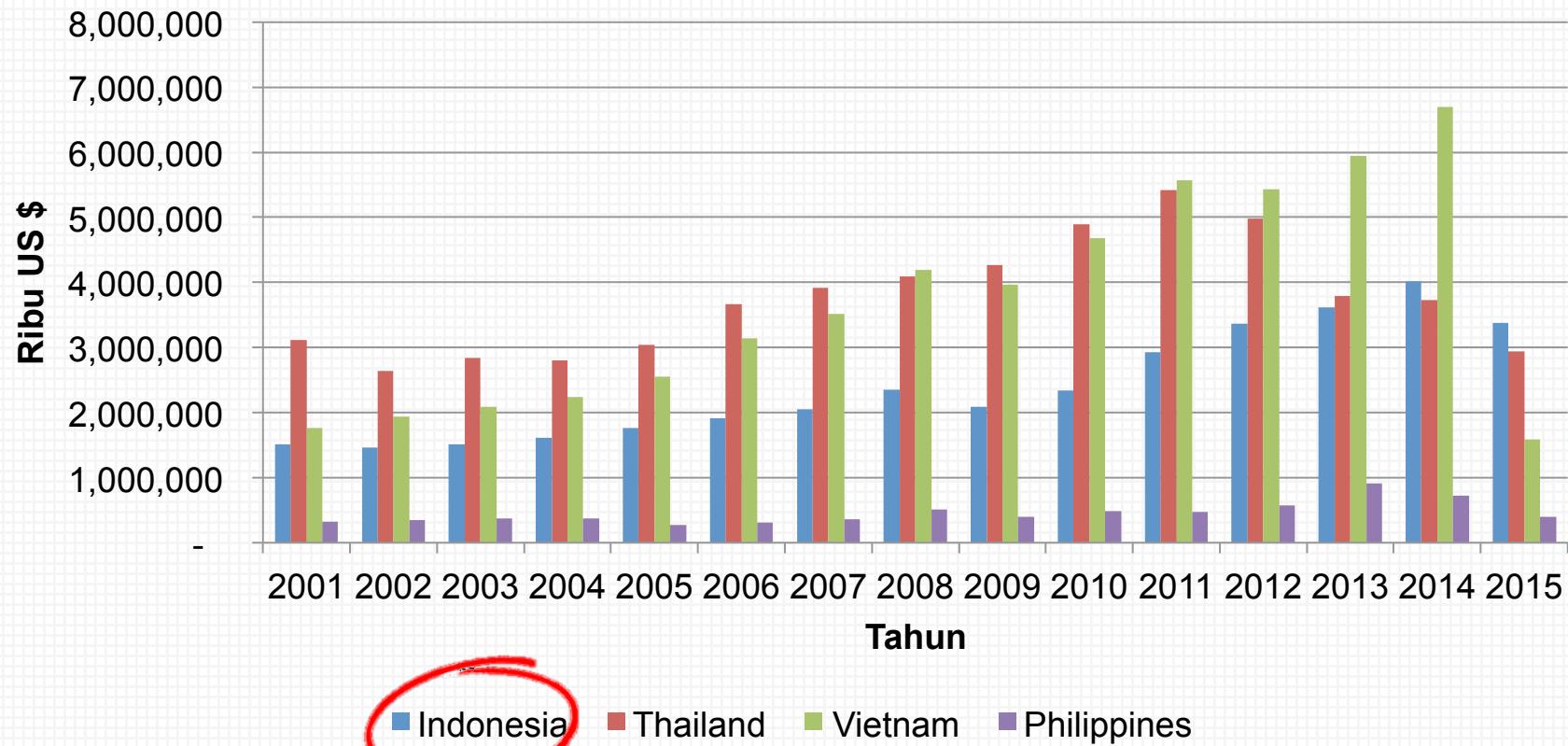
URAIAN	% PERTUMBUHAN	
	2012-2016	2015-2016
Ekspor	-3.09	0.34
Impor	-7.48	-9.10

URAIAN	% PERTUMBUHAN	
	2012-2016	2015-2016
Ekspor	2.19	4.96
Impor	-2.77	5.67
Neraca	2.90	4.88

Neraca Perdagangan Ikan Indonesia Nomor 1 di ASEAN di 2015

Neraca Perdagangan Ikan Thailand dan Vietnam turun drastis di 2014-2015

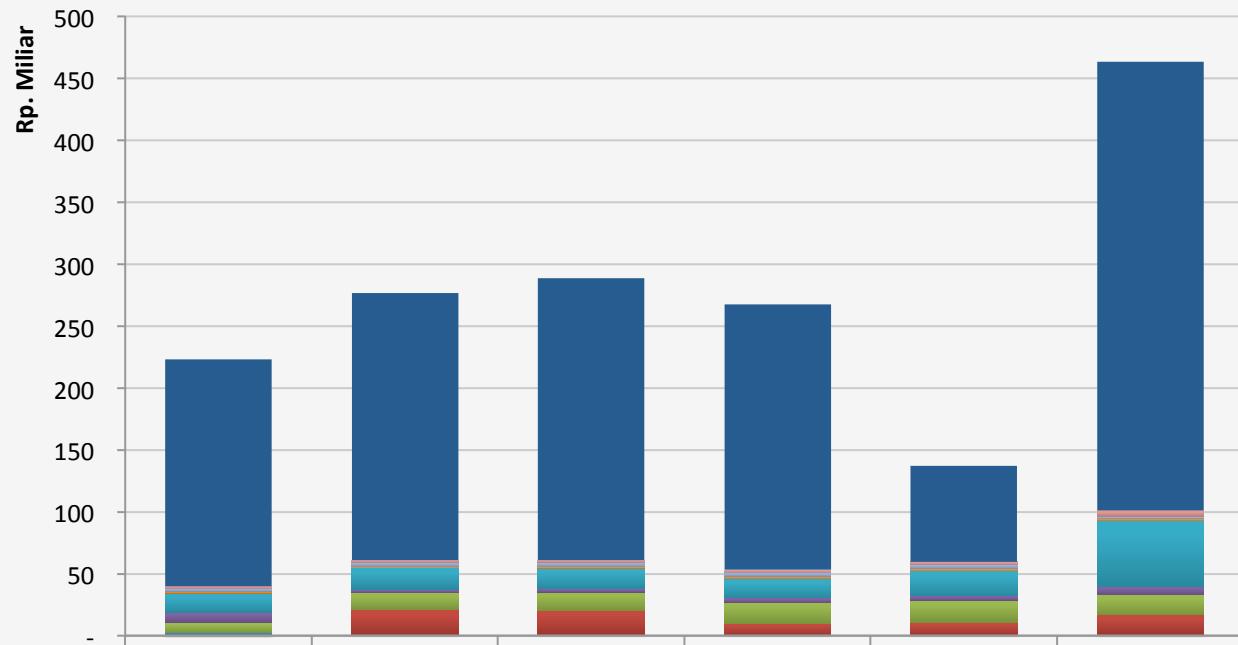
Neraca Perdagangan Ikan (HS 03 & HS 16) di Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina 2001-2015



Sumber: International Trade Center, 2016

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan meningkat

Rp462.227.824.744,-

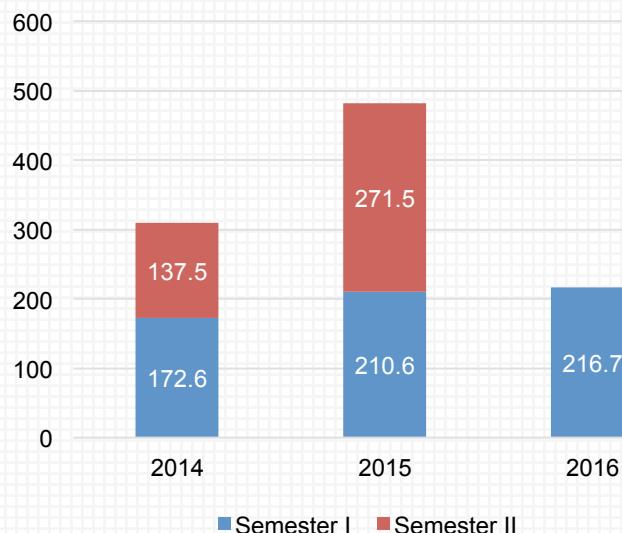


(Sumber : SPAN Kemenkeu, 17 Jan 2017)

Pajak Penghasilan (PPh) Sektor Perikanan Menunjukkan Trend Meningkat

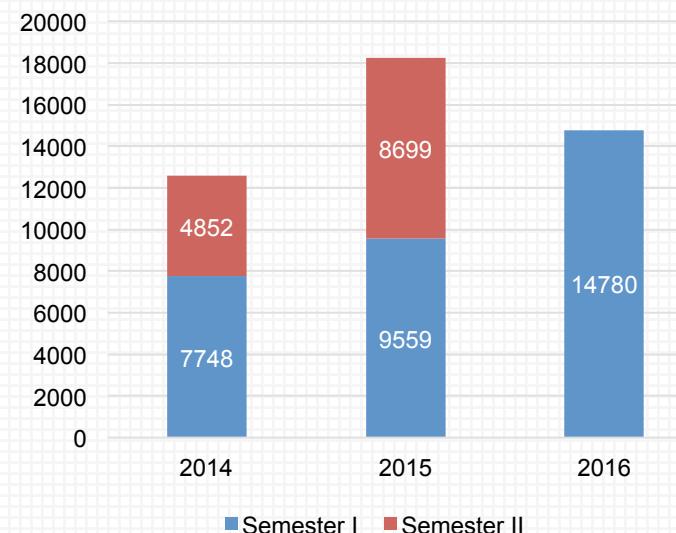
Pajak Penghasilan (PPh) meliputi PPh Pasal 25/29 dan PPh Final Pasal 4 ayat (2) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Pertumbuhan Penerimaan PPh Sektor Perikanan (Rp. Miliar) 2014-2016*



- Pada tahun 2015 terjadi peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sektor perikanan sebesar 55.46% dari semula 310.1 miliar menjadi 482.1 miliar.
- Pada semester I tahun 2016, terjadi peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sektor perikanan sebesar 3% atau 6.1 miliar dari semula 210.6 miliar menjadi 216.7 miliar .

Pertumbuhan Jumlah Pembayar PPh Sektor Perikanan 2014-2016*



- Pada tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah pembayar Pajak Penghasilan (PPh) sektor perikanan sebesar 45% dari semula 12.600 WP menjadi 18.258 WP.
- Pada semester I Tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah pembayar Pajak Penghasilan (PPh) sektor perikanan sebesar 54.6% di bandingkan periode yang sama di tahun 2015.

Sumber : i Direktorat Jenderal Pajak Sampai Juni 2016 (Semester I)

Program Percepatan Industri Perikanan Nasional (Perpres 3/2017)



Rencana Aksi Percepatan Industri Perikanan Nasional

(Perpres 3/2017)

1. Perikanan Tangkap BerkelaJutan

- Revitalisasi galangan kapal nasional dan peningkatan kapasitas kapal ikan buatan lokal
- Penegakan hukum & transparansi perizinan untuk mencegah *IUU Fishing*
- Melengkapi sarana & prasarana Pelabuhan Perikanan
- Memenuhi kebutuhan energi untuk armada kapal ikan domestik
- Melatih keterampilan dan melakukan sertifikasi nelayan

2. Perikanan Budidaya BerkelaJutan

- Mengurangi biaya pakan dalam komponen produksi budidaya
- Melengkapi sarana & prasarana untuk peningkatan produksi tambak
- Membangun kemitraan bisnis dengan pembudidaya skala UKM
- Melatih keterampilan & sertifikasi pembudidaya

3. Industri Pengolahan Hasil Perikanan

- **Akses listrik dan rantai dingin** untuk bahan baku industri perikanan
- Kemudahan **akses transportasi, ekspor & impor** untuk industri perikanan
- Kemudahan **akses tenaga kerja terampil** untuk industri perikanan
- Fasilitas **perpajakan dan tarif impor & ekspor** untuk industri perikanan
- **Standarisasi usaha dan industri pengolahan Ikan**
- **Optimalisasi sistem resi gudang** untuk produk perikanan dan rumput laut
- Percepatan Roadmap Industri Rumput Laut Nasional
- Peningkatan **akses & konsumsi ikan dalam negeri**
- Peningkatan dan perluasan **pasar luar negeri**
- **Diversifikasi dan peningkatan kualitas** produk kelautan & perikanan

Rencana Aksi Percepatan Industri Perikanan Nasional

(Perpres 3/2017)

4. Tata Ruang & Pengembangan Kawasan

- Transparansi ijin lokasi & ijin pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- Percepatan tata ruang laut nasional untuk mendukung keberlanjutan industri perikanan
- Penetapan lokasi dan menyiapkan sarana prasarana Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) sebagai Proyek Strategis Nasional

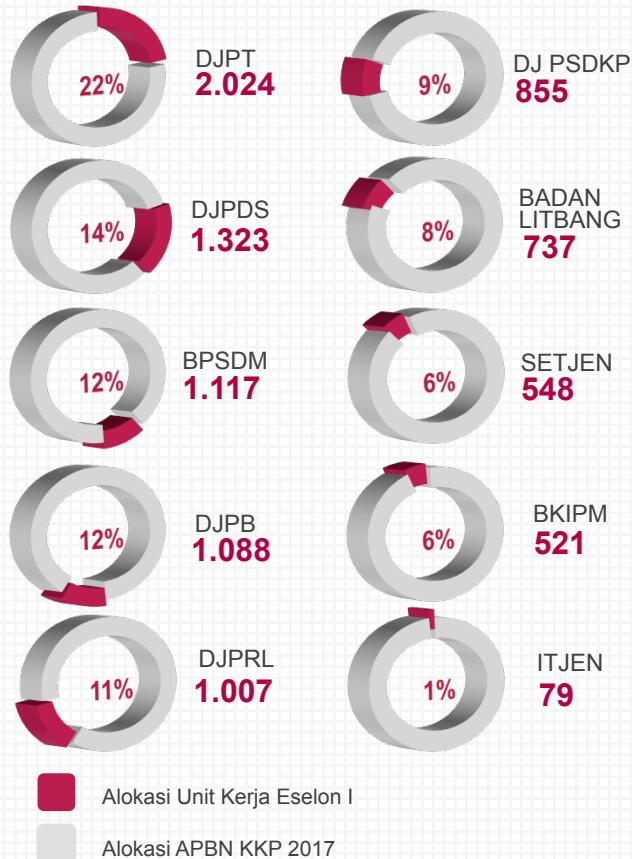
5. Regulasi, Kelembagaan & Pembiayaan

- Harmonisasi UU Perikanan dengan UU Pelayaran terkait dengan integrasi pengelolaan pelabuhan, syahbandar, gross akte, sertifikasi ABK, pelabuhan sandar kapal pengangkut, & penambahan pelabuhan khusus di hub KTI
- **Dukungan pembiayaan & akses permodalan** : Percepatan pengadaan barang & jasa untuk industri perikanan, penyertaan modal tambahan untuk BUMN Perikanan dan perluasan akses pembiayaan non-APBN untuk bisnis (BLU, KUR, Kredit Perbankan)
- **Perbaikan data & informasi perikanan melalui Satu Data**
- **Meningkatkan status kelompok menjadi koperasi**
- **Minimalisasi risiko keamanan untuk industri perikanan di pulau terluar**

APBN KKP TAHUN 2017



Menurut Unit Kerja Eselon I Rp. miliar



PRIORITAS KKP 2017

KEGIATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL
TAHUN 2017

1

**SENTRA KELAUTAN DAN
PERIKANAN TERPADU (SKPT)**

Pembangunan industri baru berbasis
kawasan di pulau-pulau terluar

2

**SENTRA MODERNISASI
PERIKANAN**

Modernisasi Industri di 5
kawasan perikanan

3

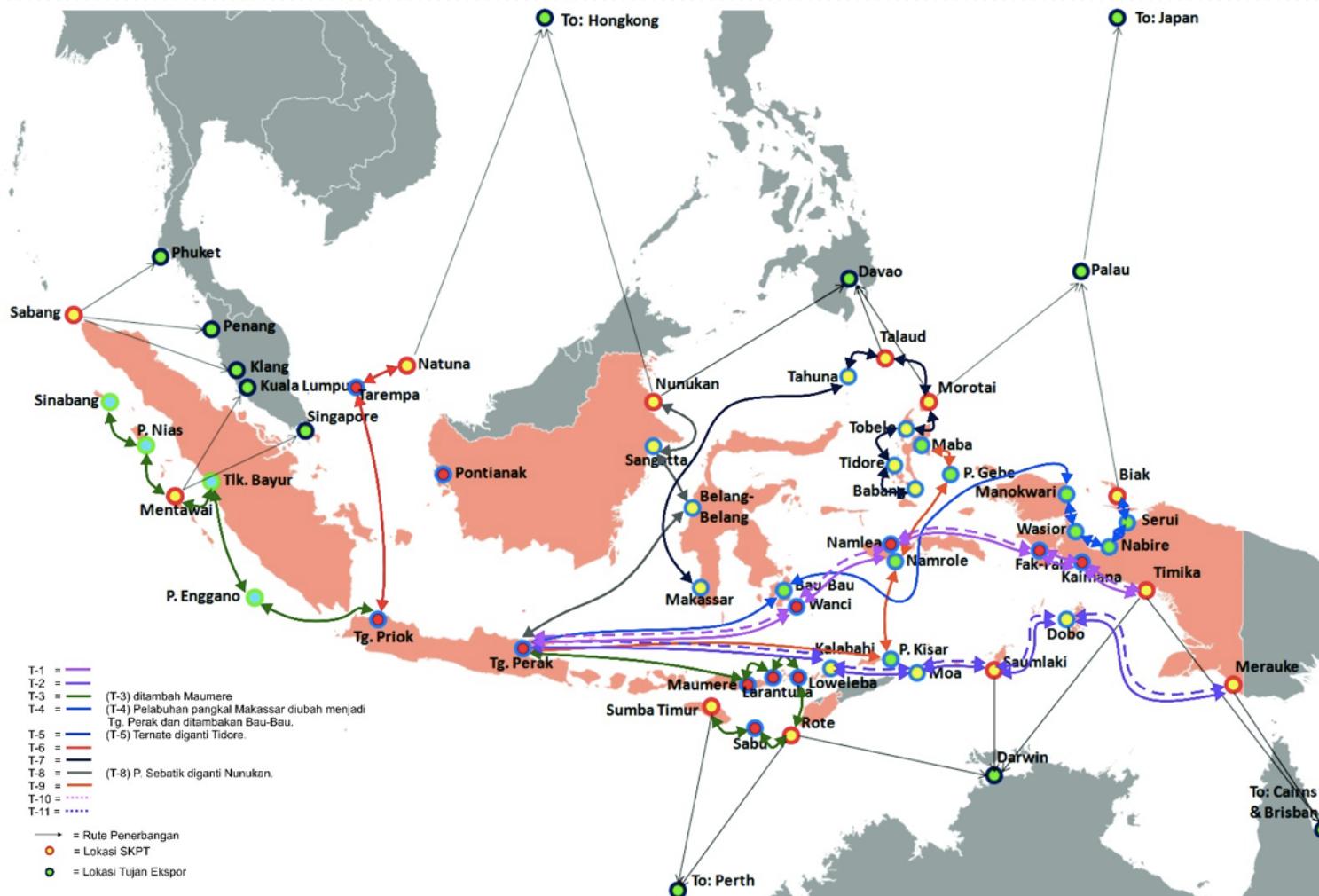
SENTRA KP LAINNYA

Program prioritas KKP mendukung
pengembangan Industri perikanan
nasional

Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)

Membangun industri baru berbasis kawasan di pulau-pulau terluar, mendekatkan dengan gateway ekspor

Rencana Lokasi 12 SKPT di 2017 & Rute Tol Laut 2017



Lokasi 12 SKPT Tahun 2017

1. Natuna
2. Saumlaki
3. Merauke
4. Mentawai
5. Nunukan
6. Talaud
7. Morotai
8. Biak Numfor
9. Mimika
10. Rote Ndao
11. Sumba Timur
12. Sabang

Sumber:

- Rute Tol Laut: Kementerian Perhubungan, 2016
- SKTP 2017: KKP, 2016

Modernisasi Industri di 5 Kawasan yang telah ada

1

PPS Nizam Zachman Muara Baru, Jakarta

- Landing Center dan shelter/fasilitas bongkar muat
- Tempat Pelelangan Ikan I dan II
- Pasar ikan modern (untuk retail dan wholesaler)
- High grade fish market
- Ice flake machine
- Kendaraan berpendingin roda 6

2

PPS Bitung, Bitung Sulawesi Utara

- Tempat Pelelangan Ikan
- Ice flake machine
- Unit Pengolahan ikan/Integrated Cold Storage kapasitas 500 ton
- Kendaraan berpendingin roda 6



3

PPN Pengambangan Jembrana, Bali

- Tempat Pelelangan Ikan
- Ice flake machine
- Unit Pengolahan ikan/Integrated Cold Storage kapasitas 500 ton
- Kendaraan berpendingin roda 6

4

PPP Sendang Biru Malang, Jawa Timur

- Tempat Pelelangan Ikan
- Ice flake machine
- Kendaraan berpendingin roda 4

5

Jayanti Cianjur

- Dermaga
- Ice flake machine





TERIMA KASIH

Surabaya, 4 Februari 2017